



Peran Stakeholder Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Indralaya dalam Teori Fungsionalisme Struktural

INFO PENULIS

Rigina Aliza
Universitas Sriwijaya
riginaalizana@gmail.com

Fairo Ningsih
Universitas Sriwijaya
Faironingsih3@gmail.com

Dwi Haryanti
Universitas Sriwijaya
haryantidwih@gmail.com

Izzaty Nagita Putri
Universitas Sriwijaya
izzatynagitap@gmail.com

Tasya Astridianisa
Universitas Sriwijaya
Tasyaastrianisa27@gmail.com

Mustar Robi
Univeritas Sriwijaya
Mustarr53@gmail.com

Rudy Kurniawan
Universitas Sriwijaya
rudykurniawan@fisip.unsri.ac.id

Ilal Ilham
Universitas Sriwijaya
ilalilham@fisip.unsri.ac.id

Kurnia Asni Sari
Universitas Sriwijaya
kurniaasnisari@fisip.unsri.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Saran Penulisan Referensi

Aliza, R., Ningsih, F., Haryanti, D., Putri, I. N., Astridianisa, T., Robi, M., Kurniawan, R., Ilham, I., & Sari, K. A. (2026). Peran Stakeholder Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Indralaya dalam Teori Fungsionalisme Struktural. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 1173-1181.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana manajemen stakeholder berperan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Indralaya. Penelitian ini dilakukan karena kebijakan pemerintah dan keterlibatan dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan di tingkat sekolah adalah faktor penting dalam keberhasilan program pemenuhan gizi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian: pengelola dapur MBG, staf dapur, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis stakeholder yang didasarkan pada atribut kepentingan (interest) dan kekuatan (power). Selanjutnya, teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons digunakan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi dan peran masing-masing aktor dalam menjaga keberlangsungan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari pengambilan keputusan hingga pengelolaan operasional hingga bagaimana siswa mendapatkan manfaat dari program, setiap stakeholder memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjalankan program. Terbukti bahwa program MBG meningkatkan kesiapan siswa untuk belajar, meningkatkan pemenuhan gizi mereka, dan mendukung proses pendidikan di sekolah. Agar program berjalan lebih efisien dan berkelanjutan, temuan ini merupakan dasar untuk meningkatkan koordinasi dan pengelolaan stakeholder.

Kata Kunci: Manajemen Stakeholder; Makan Bergizi Gratis (MBG); Pemenuhan Gizi Siswa; Program Pendidikan; Fungsionalisme Struktural

Abstract

The purpose of this study was to examine how stakeholder management plays a role in implementing the Free Nutritious Meals Program (MBG) at Indralaya 1 Public High School. This research was conducted because government policy and the involvement and coordination of various stakeholders at the school level are important factors in the success of student nutrition programs. The approach applied in this study was qualitative, using observation, in-depth interviews, This study uses a qualitative approach that collects data through field observations and in-depth interviews with parties involved in the study: MBG kitchen managers, kitchen staff, school principals, students, parents, and school officials. The data obtained was then analyzed using stakeholder analysis based on attributes of interest and power. Furthermore, Talcott Parsons' structural functionalism theory was used to provide an understanding of the functions and roles of each actor in maintaining the sustainability of the program. The results of the study show that, from decision-making to operational management to how students benefit from the program, each stakeholder has a complementary role in running the program. It has been proven that the MBG program improves students' readiness to learn, improves their nutritional intake, and supports the educational process in schools. In order for the program to run more efficiently and sustainably, these findings form the basis for improving stakeholder coordination and management.

Key Words: Stakeholder Management; Free Nutritious Meals; Student Nutritional Fulfillment; Educational Program; Structural Functionalism

A. Pendahuluan

Pemenuhan gizi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan gizi menjadi salah satu permasalahan kesehatan bagi anak yang dapat menyebabkan gangguan baik secara fisik, psikologis dan prestasi (Munifa et al., 2022). Asupan gizi yang seimbang dan memadai membuat anak lebih konsentrasi terhadap pembelajaran, aktif berpartisipasi, dan membantu mencapai prestasi yang memuaskan. Program makan gratis di sekolah dapat meningkatkan tingkat kehadiran siswa hingga 9% dan meningkatkan capaian akademik mereka (Bundy et al. dalam Qomarrullah et al., 2025).

Saat ini kita masih terus berusaha keras untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi. Gizi buruk merupakan salah satu hal yang menjadi persoalan global, termasuk Indonesia (Rumlah, 2022). Berdasarkan FAO et al. (2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, angka *Prevalence of Undernourishment (PoU)* global berada pada angka 9,1 persen yang berarti hampir satu dari

sepuluh penduduk dunia masih mengalami kekurangan pangan atau malnutrisi. Diperkirakan antara 713 hingga 757 juta orang mengalami kekurangan gizi pada tahun 2023, atau sekitar 8,9 hingga 9,4 persen dari total populasi dunia.

Di Indonesia, masalah stunting dan gizi buruk masih menjadi tantangan besar di dunia pendidikan (Qomarrullah et al., 2025). Menyadari bahwa kekurangan gizi atau gizi kronis berdampak signifikan terhadap kualitas dan produktifitas manusia, maka persoalan gizi ini perlu kebijakan yang efektif untuk memastikan pemenuhan nutrisi, terutama untuk kalangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa (Nango et al., 2025). Tantangan gizi buruk dan ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah struktural yang serius, yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan emosional yang memengaruhi kemampuan belajar dan partisipasi dalam pendidikan (Agustini & Mulyani, 2025)

Gizi yang cukup akan berdampak langsung pada performa akademik dan pertumbuhan fisik mereka. Kebijakan program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu bentuk strategis nasional untuk mengatasi persoalan gizi kronis (Nango et al., 2025). Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai strategi yang berorientasi pada pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan tidak hanya berfungsi untuk menekan angka malnutrisi, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa, terutama dari masyarakat rendah, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara akademik dan sosial (Qomarrullah et al., 2025).

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tidak dapat lepas dari keterlibatan peran dan kepentingan dari berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, staff, pengelola dapur, hingga pihak eksternal sebagai aktor yang saling terhubung. Setiap pihak saling mempengaruhi dan dipengaruhi untuk mencapai tujuan dari manajemen termasuk dalam kategori stakeholder. Program akan berjalan secara efektif jika hubungan, koordinasi, dan komunikasi antar pihak dikelola secara sistematis. Stakeholder dengan melibatkan guru, orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat sekitar, diidentifikasi sebagai unsur kunci dalam pengelolaan yang efektif (Jaenudin, 2024).

Stakeholder adalah kelompok individu atau entitas yang memiliki kepentingan dan keterlibatan langsung dalam suatu organisasi atau institusi, membentuk jaringan hubungan kompleks di dalam lingkungan pendidikan (Athiyah dalam Jaenudin, 2024). Pemangku kepentingan diharapkan dapat mengurutkan pemangku kepentingan sesuai minat atau kekuatan dengan efektifitas dan efisiensi standar nasional yang tepat meningkatkan kinerja proyek menjadi lebih baik sesuai dengan perannya (Rabbani et al., 2022). Peran muncul sebagai elemen-elemen utama yang tidak hanya memiliki kepentingan pribadi tetapi juga memberikan kontribusi substansial terhadap pengambilan keputusan di sekolah.

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang berbeda namun tetap saling melengkapi dalam mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Al Huda & Baharun, 2025). Stakeholder pendidikan dapat di kelompokkan menjadi dua bagian, internal dan eksternal. Internal seperti kepala sekolah, guru siswa, tata usaha dan lain-lain yang berada dalam lingkungan sekolah, sedangkan eksternal adalah masyarakat yang ada di sekitar sekolah yang memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan, misalnya komite sekolah, orang tua murid, pengawas dan lain-lain (Sunardi & Muallil, 2023). Peran stakeholder sangat dibutuhkan agar kondisi sekolah berada di atas standar minimum dan program peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

Stakeholder sebagai kunci dengan berbagai peran dan tanggung jawab yang beragam. Guru, adalah agen yang langsung terlibat dalam proses pembelajaran, harus mampu menyampaikan materi dengan metode yang tepat, merespons kebutuhan individual siswa, dan memotivasi mereka untuk belajar (Syafaruddin et al., 2020). Kepala sekolah, sebagai pemimpin pendidikan, bertanggung jawab tidak hanya terdapat kelancaran operasional sekolah, tetapi juga terhadap menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan. Menurut Siregar, pentingnya manajemen pendidikan tidak hanya terbatas pada lingkup sekolah, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada perkembangan masyarakat dan negara karena pendidikan yang dikelola dengan baik akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (Jaenudin, 2024).

Dalam konteks ini, peran guru, orang memiliki kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi substansial terhadap pengambilan keputusan manajemen di (Modelu & Pido, 2019). Guru, sebagai stakeholder yang sangat relevan, perannya tidak cuma mengajar tetapi juga sebagai agen perubahan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Mereka bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam membentuk karakter dan memotifasi peserta didik (Jaenudin, 2024). Peran guru dalam pengambilan

keputusan tidak dapat diabaikan, karena mereka memiliki pengalaman langsung dengan dinamika kelas dan kebutuhan siswa.

Sementara itu, orang tua siswa sebagai posisi central dari stakeholder yang memiliki peran signifikan dalam membentuk arah pendidikan (Syafaruddin et al., 2020). Keterlibatan mereka dalam mendukung dan memahami kebutuhan anak mereka menjadi faktor penting dalam merancang sebuah program pendidikan yang berkelanjutan. Melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat antara rumah dan sekolah, mendukung perkembangan secara menyeluruh (Suriono, 2021). Tidak kalah penting, peran masyarakat sekitar juga turut berkontribusi dengan dukungan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, sementara ketidaksetujuan atau ketidaktahuan dapat menjadi hambatan (Mustakim, 2020).

Interaksi yang berjalan antara sekolah dan masyarakat sekitar memiliki dampak langsung terhadap efektivitas manajemen pendidikan. Dalam esensi, peran stakeholder menciptakan kerangka kerja yang dinamis, di mana kolaborasi dan dialog terus-menerus diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif (Handoyo et al., 2021). Analisis mendalam terhadap peran stakeholder menjadi fondasi kritis dalam memahami kompleksitas manajemen pada program pendidikan, untuk pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah.

Peran-Peran antar stakeholder dianalisis dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori digunakan sebagai konsep dalam memahami bagaimana setiap masing-masing stakeholder dalam Program Makanan Bergizi Gratis memiliki fungsi, tugas dan peran tertentu dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan dari program tersebut. Hasil dari analisis mengenai kepentingan dan memperlihatkan posisi serta prioritas setiap aktor dalam konteks Program Makanan Bergizi Gratis.

Pelaksanaan program sering kali mengalami perbedaan kepentingan, pembagian peran, dan tantangan saat mengkoordinasi. Perhatian terhadap pola manajemen stakeholder menjadi sesuatu yang penting untuk menghimbau terjadinya konflik dalam memahami sejauh mana program Makan Bergizi Gratis dapat berkelanjutan dalam waktu jangka panjang. Bagaimana peran stakeholder dalam program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 1 Indralaya terlaksana dan pengelolaan membentuk efektivitas, dengan memahami relasi, kontribusi, dan gambaran mengenai praktik peran stakeholder dalam program berbasis pendidikan.

B. Metodologi

Penelitian ini mengeksplorasi peran manajemen stakeholder dalam menerapkan Program Makanan Bergizi Gratis di SMA Negeri 1 Indralaya. Untuk memulai penelitian, pihak sekolah, komite sekolah, siswa, orang tua, dan dinas terkait diidentifikasi melalui observasi Identifikasi ini dilakukan sesuai dengan pendekatan analisis pemangku kepentingan, yang menekankan pentingnya identifikasi pemangku kepentingan sebagai langkah awal dalam penelitian program sosial atau kebijakan publik. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktor yang mempengaruhi dan terdampak program termuat secara menyeluruh dalam analisis.

Setelah mengidentifikasi stakeholder potensial melalui observasi lapangan dan meninjau dokumen sekolah, langkah berikutnya adalah wawancara mendalam dengan stakeholder yang telah diidentifikasi. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur dan dirancang untuk mengeksplorasi perspektif, peran, dan kontribusi masing-masing stakeholder terhadap pelaksanaan program. Dipilihnya teknik wawancara karena sangat efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara interaksi antar pemangku kepentingan dalam konteks pendidikan berjalan. Selanjutnya, data dari wawancara dan observasi digunakan untuk membuat profil stakeholder berdasarkan peran, keterlibatan, dan dampak terhadap program. Profil ini mencakup siapa stakeholder tersebut, bagaimana mereka berada dalam struktur organisasi sekolah atau komunitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam program.

Selain itu, Peneliti melakukan analisis menggunakan dua atribut utama, yaitu kepentingan (*interest*) dan kekuatan/pengaruh (*power*), untuk menentukan tingkat kepentingan atau prioritas pihak berwenang. Data hasil wawancara yang diperoleh dari para stakeholder kemudian dianalisis menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana setiap stakeholder dalam Program Makanan Bergizi Gratis memiliki fungsi dan peran tertentu dalam menjaga keberlangsungan sistem program tersebut. Hasil dari analisis mengenai

kepentingan dan kekuatan pemangku kepentingan telah dipetakan untuk memperlihatkan posisi serta prioritas setiap aktor dalam konteks Program Makanan Bergizi Gratis. Pemetaan ini tidak hanya mencerminkan variasi tingkat pengaruh di antara para pemangku kepentingan, tetapi juga menyediakan landasan untuk merumuskan saran-saran dalam pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan di masa depan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan program tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Program Makanan Bergizi Gratis memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang secara gratis kepada kelompok tertentu, seperti siswa di sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh setiap hari, membantu tumbuhnya tubuh dan perkembangan otak, serta mencegah berbagai masalah gizi seperti kurangnya energi, anemia, dan stunting. Dalam dunia pendidikan, memberikan makanan bergizi secara gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok para siswa, tetapi juga menjadi upaya sosial yang membantu meningkatkan fokus mereka dalam belajar, kehadiran di sekolah, serta meratakan akses terhadap pangan yang sehat. Program ini biasanya dijalankan dengan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan penyedia layanan gizi, dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan makanan, serta keseimbangan nutrisi yang baik.

Kebutuhan makanan bergizi bagi siswa merupakan hal penting yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan hasil belajar mereka. Pada masa remaja, kebutuhan akan energi, protein, vitamin, dan mineral meningkat karena tubuh sedang tumbuh lebih cepat dan pikiran juga sedang berkembang. Asupan gizi yang seimbang mencakup karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membentuk jaringan tubuh, lemak sehat, serta mikronutrien seperti zat besi, kalsium, dan vitamin. Hal ini penting untuk menjaga daya tahan tubuh, kemampuan belajar, dan kestabilan suasana hati. Kurang gizi pada siswa bisa menyebabkan fokus menurun, merasa lelah, rentan anemia, dan juga membuat prestasi belajar menjadi lebih buruk.

Dalam perspektif *Structural Functionalism*, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. Setiap institusi sosial, seperti keluarga, pendidikan, dan kebijakan publik, memiliki peran dalam mempertahankan stabilitas dan keteraturan sosial. Sistem sosial akan berjalan secara harmonis apabila setiap elemen menjalankan fungsinya secara optimal dan saling melengkapi. Dengan demikian, kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat juga berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. (Juwita et al., 2020)

Berdasarkan perspektif ini, program makanan sehat gratis di sekolah dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk membantu sistem pendidikan beroperasi di masyarakat. Memenuhi kebutuhan nutrisi siswa meningkatkan kesehatan mereka, konsentrasi mereka saat belajar, dan partisipasi mereka dalam kegiatan akademik. Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih baik jika kebutuhan dasar siswa dipenuhi. Hal ini akan memungkinkan sekolah untuk memenuhi tugasnya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Selain itu, dari sudut pandang fungsionalisme, kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah membantu menjaga keseimbangan sistem masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar kelompok tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa program pemberian makanan di sekolah dapat meningkatkan partisipasi siswa, status gizi mereka, dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Program makanan bergizi di sekolah dapat dianggap sebagai bentuk intervensi sosial yang mendukung pendidikan dengan menjamin bahwa siswa mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, program ini berfungsi sebagai kebijakan kesehatan dan kebijakan sosial yang mendukung sistem Pendidikan.

Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG merupakan wujud nyata kepedulian negara terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia. Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai kajian, persentase anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi masih berada pada kisaran lebih dari 20 hingga 30 persen. Kondisi tersebut menjadi dasar kuat perlunya intervensi pemerintah melalui Program MBG sebagai kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesiapan belajar generasi muda. (Jati & Iriani, 2025)

Selain berdampak pada aspek kesehatan, program ini turut berkontribusi terhadap peningkatan kehadiran siswa di sekolah, konsentrasi belajar, serta pemberdayaan ekonomi lokal (Agustini & Mulyani, 2025).

Di SMA Negeri 1 Indralaya, Program MBG mulai dilaksanakan sejak tahun 2024 dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program ini dikoordinasikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Ra Al-Azhar sebagai penyedia layanan teknis pemenuhan gizi siswa. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh keterpaduan sistem kerja, koordinasi antarstakeholder, serta pengawasan terhadap mutu dan kuantitas makanan yang disalurkan kepada siswa.

Dalam penelitian Program MBG ini terdapat enam stakeholder, yaitu Kepala SPPG (KSPPG) sebagai pemegang kewenangan utama, serta kepala sekolah, staf dapur MBG, siswa, orang tua siswa, dan kantin sekolah. Masing-masing stakeholder memiliki peran yang berbeda dan saling berkaitan dalam pelaksanaan program. Interaksi di antara mereka memengaruhi jalannya Program MBG di sekolah, baik dari sisi pelaksanaan maupun dampak yang dirasakan oleh masing-masing pihak.

Kepala SPPG (KSTPG) memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan seluruh aktivitas operasional dapur yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG. Tanggung jawab tersebut mencakup perencanaan produksi makanan, pengawasan proses pengolahan, pengendalian mutu, serta pengaturan distribusi makanan ke sekolah sasaran, termasuk SMA Negeri 1 Indralaya. Peran KSTPG menempatkannya sebagai penghubung antara kebijakan program dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

Dalam kegiatan operasionalnya, dapur MBG melibatkan 47 tenaga kerja yang terbagi ke dalam beberapa kelompok kerja, yaitu tim persiapan bahan, tim pengolahan, tim pemorsian, dan tim distribusi. Selain itu, terdapat tiga tenaga administrasi yang terdiri atas KSTPG, seorang akuntan, dan seorang staf administrasi. Dengan demikian, total tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan dapur berjumlah 50 orang. Pembagian tugas yang jelas ini bertujuan agar seluruh tahapan pengolahan makanan dapat berjalan secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Proses pengolahan makanan dimulai dari penerimaan bahan baku berupa beras, sayuran, buah-buahan, serta bahan pangan lainnya yang diperlukan untuk menu harian siswa. Bahan-bahan tersebut tidak langsung diolah, tetapi disimpan terlebih dahulu di gudang yang dipisahkan antara gudang basah dan gudang kering. Pemisahan tempat penyimpanan ini dilakukan untuk menjaga kualitas bahan pangan agar tetap segar, tidak mudah rusak, dan terhindar dari kontaminasi.

Tahap selanjutnya adalah persiapan bahan makanan yang dilakukan pada sore hingga malam hari. Pada tahap ini, tim persiapan melakukan kegiatan mencuci, memotong, dan menyiapkan bahan pangan sesuai dengan menu yang telah direncanakan. Proses persiapan dilakukan dalam jumlah besar karena makanan diproduksi untuk ratusan hingga ribuan siswa setiap hari. Kegiatan ini berlangsung hingga sekitar pukul 23.00–24.00 WIB, bergantung pada jumlah porsi yang harus disiapkan.

Setelah tahap persiapan selesai, proses dilanjutkan oleh tim pengolahan pada dini hari hingga pagi hari. Tim ini bertugas memasak seluruh menu yang telah dipersiapkan, seperti nasi, lauk pauk berupa ikan atau ayam, serta sayuran. Seluruh proses memasak dilakukan dengan mengacu pada standar kebersihan dan keamanan pangan agar makanan yang dihasilkan aman dikonsumsi oleh siswa. Setiap tahapan pengolahan diawasi untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat memengaruhi kualitas dan keamanan makanan.

Sekitar pukul 05.00 WIB, kegiatan memasuki tahap pemorsian. Tim pemorsian membagi makanan ke dalam wadah sesuai dengan jumlah porsi yang telah ditentukan. Pembagian dilakukan secara cermat agar setiap siswa memperoleh porsi yang sama dan sesuai dengan standar gizi. Setelah itu, makanan dikemas dan diserahkan kepada tim distribusi untuk dikirim ke sekolah tujuan.

Tim distribusi bertanggung jawab memastikan makanan sampai ke sekolah tepat waktu dan dalam kondisi layak konsumsi. Distribusi dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan pihak sekolah. Ketepatan waktu menjadi faktor penting karena makanan harus dikonsumsi dalam keadaan segar dan tidak mengalami penurunan kualitas.

Koordinasi antara dapur dan sekolah dilakukan melalui petugas Asisten Lapangan (Aslap). Setiap sekolah memiliki PIC (*Person in Charge*) yang berkomunikasi langsung dengan Aslap. Apabila terjadi perubahan jumlah siswa, hari libur sekolah, atau kegiatan tertentu, pihak sekolah akan menyampaikan informasi tersebut kepada Aslap. Informasi ini kemudian diteruskan kepada KSTPG dan tim administrasi untuk dilakukan penyesuaian jumlah produksi makanan.

Penyesuaian jumlah porsi berpengaruh pada jumlah bahan baku yang dipesan dari pemasok. Sebagai contoh, jika jumlah siswa berkurang, maka jumlah bahan pangan seperti beras yang

biasanya dipesan sepuluh karung dapat dikurangi menjadi delapan karung. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah pemborosan bahan pangan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Penentuan menu dan standar porsi dilakukan berdasarkan rekomendasi tim ahli gizi. Tim gizi menetapkan ukuran porsi sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang telah ditentukan. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya menekankan pada kuantitas makanan, tetapi juga pada kualitas gizi yang diberikan kepada siswa.

Dalam pelaksanaannya, kendala yang sering muncul berkaitan dengan kekurangan bahan makanan tertentu, seperti buah atau lauk. Jika kondisi tersebut terjadi, pihak sekolah melalui PIC akan segera melaporkan kepada KSTPG. Selanjutnya, tim dapur akan menyiapkan tambahan makanan dan mengirimkannya kembali ke sekolah pada hari yang sama.

Untuk mengantisipasi kekurangan porsi, dapur menerapkan sistem buffer atau cadangan produksi. Artinya, jumlah makanan yang diproduksi selalu dlebihkan dari kebutuhan aktual. Sebagai ilustrasi, apabila kebutuhan produksi sebesar 10 kilogram, maka dapur akan menyiapkan sekitar 11 kilogram sebagai cadangan. Sistem ini bertujuan untuk menghindari kekurangan makanan akibat kesalahan perhitungan atau perubahan jumlah siswa secara mendadak.

Pengawasan mutu makanan dilakukan melalui penerapan standar kebersihan dapur. Seluruh fasilitas dapur wajib memiliki Sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan bahwa proses pengolahan makanan telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi ini menjadi dasar dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh siswa.

Berdasarkan analisis stakeholder, kepala sekolah dan Kepala SPPG (KSTPG) memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi karena berperan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan teknis program. Staf dapur MBG memiliki kepentingan tinggi dengan kekuatan sedang sebagai pelaksana teknis. Siswa memiliki kepentingan tinggi sebagai penerima manfaat langsung, namun memiliki kekuatan rendah dalam pengambilan keputusan. Orang tua siswa memiliki kepentingan terhadap kualitas makanan karena berkaitan dengan kesehatan anak mereka, sedangkan kantin sekolah terdampak secara tidak langsung akibat perubahan pola konsumsi siswa di lingkungan sekolah.

Jumlah siswa SMA Negeri 1 Indralaya yang dilayani dalam Program MBG mencapai 1.112 siswa. Proses pengolahan makanan untuk seluruh siswa tersebut dilaksanakan oleh sembilan tenaga pengolah dalam satu kali produksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tenaga kerja dilakukan secara efisien meskipun melayani jumlah siswa dalam jumlah besar.

Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa Program MBG memberikan manfaat nyata, terutama dalam membantu menghemat pengeluaran karena siswa tidak perlu membeli makanan sendiri di sekolah. Distribusi makanan dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB dan siang hari sekitar pukul 13.00 WIB. Secara umum, pembagian makanan berjalan lancar meskipun pada beberapa kesempatan terjadi keterlambatan.

Program ini juga berdampak positif terhadap proses belajar siswa. Siswa merasa lebih bertenaga dan lebih siap mengikuti kegiatan pembelajaran setelah menerima makanan bergizi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pemenuhan gizi dengan konsentrasi dan kesiapan belajar siswa.

Meskipun demikian, siswa juga menyampaikan beberapa masukan terkait pelaksanaan program. Mereka mengharapkan adanya penambahan porsi makanan serta variasi menu yang lebih beragam. Jenis buah yang disajikan dinilai terlalu sering berupa pisang sehingga siswa menginginkan variasi buah lain agar tidak menimbulkan kejenuhan.

Sistem distribusi makanan direncanakan akan dikembangkan melalui mekanisme pemesanan berbasis aplikasi (*taking order*). Melalui sistem ini, pihak sekolah dapat memesan jumlah porsi sesuai dengan kebutuhan aktual setiap hari secara digital. Pengembangan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan data, efisiensi distribusi, serta mempermudah pengawasan terhadap jumlah makanan yang disalurkan.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Indralaya, dan setiap pihak memiliki peran dan tugas masing-masing untuk memastikan program berlangsung. Kepala sekolah, kepala SPPG, staf dapur MBG, siswa, orang tua siswa, dan kantin sekolah adalah pihak-pihak penting yang terlibat. Meskipun masing-masing aktor memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda,

mereka semua saling berhubungan untuk membuat sistem kerja yang memungkinkan program dilaksanakan dengan baik.

Menurut teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, program ini dapat dianggap sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai komponen yang saling melengkapi untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas program. Staf dapur menjalankan operasi produksi dan distribusi makanan, sementara kepala sekolah dan kepala SPPG bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan teknis program. Siswa, di sisi lain, merasakan dampak langsung dari program tersebut.

Secara keseluruhan, Program MBG bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah, memenuhi kebutuhan gizi siswa, dan meningkatkan kesiapan mereka untuk belajar. Namun, variasi menu dan waktu distribusi makanan yang tepat adalah beberapa masalah yang masih ada saat menjalankan program. Oleh karena itu, agar program dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan di masa mendatang, koordinasi yang lebih baik antar stakeholder serta evaluasi berkelanjutan diperlukan.

E. Referensi

- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Al Huda, U., & Baharun, H. (2025). PERAN STAKEHOLDER DALAM MENINGKATKAN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN. *PIJAR PELITA: JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI*, 1(2), 182–194.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2024). The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 – Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms. <https://doi.org/10.4060/cd1254en>
- Handoyo, K., Mudhofir, M., & Maslamah, M. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 321–332. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1855>
- Jaenudin. (2024). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah: Perspektif Pendidikan. *Journal of Education Research*, 5(1), 939–944.
- Jati, A. K., & Iriani, A. (2025). *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia*. 8(1), 700–711.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., Aliman, M., & Malang, U. N. (2020). 4 1,2,3. 3(1), 1–8.
- Modelu, R., & Pido, A. (2019). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS): antara Harapan dan Realita di SMA Negeri 3 Atinggola. *Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 128–142.
- Munifa, Ramadhani Juni, & Yusup Aldian. (2022). Peran Keluarga Terhadap Pemenuhan Gizi Anak Usia Sekolah. *Jurnal Forum Kesehatan : Media Publikasi Kesehatan Ilmiah*, 12(1), 26–32.
- Mustakim, B. (2020). Perspektif Psikologi Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Pendidikan. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(2), 187–202. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i2.1965>
- Nango, M., Purwoko, B., & Hazim, M. (2025). MAKAN BERGIZI GRATIS : STRATEGI KEBIJAKAN PUBLIK MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045. *Oktober*, 25(2), 2085–0743. <https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.991>
- Qomarrullah, R., Suratni, Wulandari, L., & Sawir, M. (2025). DAMPAK JANGKA PANJANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Rabbani, M. K., Abimanyu, A., Furqon, A. Z., & Yaqin, M. A. (2022). Manajemen Stakeholder pada Sekolah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Menggunakan Project Management Body of Knowledge (PMBOK). *JACIS: Journal Automation Computer Information System*, 2(02), 116–124.
- Rumlah, S. (2022). MASALAH SOSIAL DAN SOLUSI DALAM MENGHADAPI FENOMENA STUNTING PADA ANAK. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1(3), 83–91.
- Sunardi, & Muallil. (2023). PERAN STAKEHOLDER INTERNAL DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 1 WONOSALAM JOMBANG. *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 160–174.
- Suriono, Z. (2021). Analisis SWOT dalam Identifikasi Mutu Pendidikan. *ALACRITY: Journal Of Education*, 1(3), 94–103. <http://ppppublishing.com/index.php/alacrity>

Syafaruddin, Napitupulu, D. S., & Harahap, A. S. (2020). KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPALA SEKOLAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENINGKATAN MUTU DI SMA AL-ULUM KOTA MEDAN. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 227-238. <https://doi.org/10.30868/ei.v9i01.673>